



Article Informations
Corresponding Email:
erninurnoviani@gmail.com

Received: 30/01/2025; Accepted:
15/02/2025; Published: 30/06/2025

DIPLOMASI ENERGI JERMAN DALAM MENANGANI KRISIS ENERGI AKIBAT SANKSI EMBARGO RUSIA TAHUN 2022

Erni Nur Noviani¹⁾ Yuswari O. Djemat²⁾ Jusmalia Oktaviani³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 berakar dari ketegangan geopolitik yang telah berlangsung sejak era Soviet, khususnya terkait dengan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Invasi Rusia ke Ukraina memicu sanksi ekonomi internasional yang dipimpin oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, dengan tujuan untuk menekan ekonomi Rusia dan menghentikan agresi militer tersebut. Salah satu dampak signifikan dari konflik ini adalah krisis energi yang melanda Eropa, terutama Jerman, yang bergantung pada pasokan gas alam Rusia. Dalam menghadapi krisis ini, Jerman mengambil langkah darurat untuk mendiversifikasi pasokan energi, termasuk memperluas infrastruktur LNG, menasionalisasi perusahaan gas besar, dan mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya ditutup sebagai bagian dari kebijakan energi hijau. Meskipun langkah-langkah ini bersifat sementara, Jerman tetap berkomitmen pada transisi energi terbarukan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Jerman dalam menangani krisis energi yang disebabkan oleh invasi Rusia, serta implikasi geopolitik dan ekonomi yang ditimbulkan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan energi yang tinggi terhadap Rusia telah memaksa Jerman untuk mencari alternatif pasokan energi, termasuk melalui kerjasama internasional dengan negara-negara penghasil energi lainnya.

Kata Kunci: Konflik Rusia-Ukraina, Sanksi Ekonomi, Krisis Energi, Jerman, Diversifikasi Energi, Kebijakan Energi Hijau.

Abstract

The armed conflict between Russia and Ukraine, which began in February 2022, stems from geopolitical tensions that have existed since the Soviet era, particularly related to Ukraine's desire to join NATO. Russia's invasion of Ukraine triggered international economic sanctions led by the European Union and the United States, aimed at pressuring Russia's economy and halting its military aggression. One of the significant impacts of this conflict is the energy crisis affecting Europe, particularly Germany, which has been dependent on Russian natural gas supplies. In response to this crisis, Germany has taken emergency measures to diversify its energy supply, including expanding LNG infrastructure, nationalizing major gas companies, and reactivating previously shut-down coal-fired power plants as part of its green energy policy. Although these steps are temporary, Germany remains committed to a long-term transition to renewable energy. This study aims to analyze the steps taken by the German government in addressing the energy crisis caused by Russia's invasion, as well as the geopolitical and economic implications, using a qualitative approach. The research findings indicate that Germany's high energy dependence on Russia has forced it to seek alternative energy supplies, including through international cooperation with other energy-producing countries.

Keywords: *Russia-Ukraine Conflict, Economic Sanctions, Energy Crisis, Germany, Energy Diversification, Green Energy Policy.*

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina diawali ketika Presiden Rusia mendeklarasikan operasi militer ke Ukraina pada Februari 2022. Konflik ini diawali dengan adanya isu bergabungnya Ukraina ke dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang mana, hal tersebut menjadi suatu ancaman keamanan bagi Rusia. Meski begitu ketegangan antar kedua negara sudah sering terjadi sejak 2013. Kemudian pada tahun 2014 Ukraina melakukan pemilihan presiden baru, kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan Rusia dengan mengadakan *polling* di Semenanjung Krimea, yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya memilih untuk bergabung dengan Rusia. Rusia melakukan ini tanpa melalui proses di PBB dan menegaskan Semenanjung Krimea bukan lagi bagian dari Ukraina. Hal ini jelas mengakibatkan konflik antara kedua negara hingga tahun 2015 tercapainya Perjanjian Minsk untuk menghentikan kekerasan yang berlangsung.

Pada tahun 2019 terpilihnya presiden baru Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky, dalam kampanyenya beliau akan berusaha mengakhiri ketegangan dengan Rusia dan lebih condong pada Eropa. Hal tersebut terlihat dari diadopsinya kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan Rusia, beliau juga mendorong Ukraina bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa serta meminta bergabung dengan NATO untuk meningkatkan kekuatan militernya. Sebenarnya sejak tahun 1992 sudah mulai bekerja sama hingga tahun 1997 dibentuk komisi Ukraina Nato meskipun tidak ada perjanjian keanggotaan secara formal (Diva Lufiana, 2022). Tindakan yang dilakukan Ukraina jelas mendorong Rusia untuk melancarkan operasi militer khusus terhadap Ukraina yang dilakukan untuk melindungi keamanan dan eksistensi Rusia dari ancaman Ukraina. Rusia juga berusaha membatasi

hubungan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO untuk melindungi negaranya dari ancaman blok barat dan pengaruh Amerika Serikat, dan untuk mempertahankan hubungan dekat dengan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet.

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 telah memicu serangkaian sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Uni Eropa (UE), Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya terhadap Rusia. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk menekan ekonomi Rusia dan mempengaruhi kemampuannya dalam mendanai perang. Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi besar-besaran selama sepanjang sejarah kepada Rusia sebagai respon dari adanya agresi Rusia kepada Ukraina. Sanksi yang diberikan juga sebagai respon tindakan Rusia yang melanggar integritas wilayah serta mengganggu wilayah timur Ukraina. Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia mencakup sanksi diplomatik, sanksi individu, seperti pembekuan aset dan pembatasan perjalanan, pembatasan hubungan ekonomi dengan Krimea dan Sevastopol, sanksi ekonomi yang ditujukan untuk pertukaran dengan Rusia dalam bidang tertentu, dan pembatasan hubungan kerja sama ekonomi. Pada dasarnya, sikap negara anggota UE terhadap sanksi anti-Rusia membagi mereka menjadi dua kelompok. Negara-negara di grup pertama termasuk Denmark, Swedia, Inggris, Republik Ceko, Polandia, Estonia, Lituania, dan Latvia. Negara-negara tersebut mendukung penerapan sanksi keras, seperti sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan, untuk menghentikan perselisihan Ukraina-Rusia yang semakin meluas. Negara-negara lain, termasuk Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Portugal, Yunani, Siprus, Bulgaria, Malta, Hongaria, Luksemburg, dan Austria, menganggap Rusia dengan cara yang lebih "*business as usual*". Negara-negara ini memiliki niat yang berbeda untuk melawan kebijakan anti-Rusia yang ketat karena hubungan ekonomi mereka dengan Rusia dan ketidakmampuan mereka untuk menanggung konsekuensi ekonomi dari sanksi yang tidak dapat dielakkan karena perdagangan dan sumber energi mereka yang sangat bergantung pada Rusia.

Sebagai balasan, Rusia menggunakan sumber daya energinya, terutama gas alam, sebagai alat untuk melawan sanksi-sanksi tersebut. Rusia, sebagai pemasok utama gas alam ke Eropa, memiliki posisi yang kuat dalam mempengaruhi pasokan energi di kawasan tersebut. Sebelum invasi, sekitar 40% gas alam yang diimpor UE berasal dari Rusia. Ketergantungan ini membuat banyak negara Eropa khususnya Jerman rentan terhadap gangguan pasokan. Sebagai bagian strategi balasan dari sanksi yang dijatuhkan UE, Rusia mulai mengurangi pasokan gas ke Eropa melalui saluran pipa Nord Stream 1 pada pertengahan 2022, yang akhirnya dihentikan sepenuhnya pada September 2022. Tindakan ini memicu krisis energi di Eropa, dengan harga gas alam melonjak dan kekhawatiran tentang kemampuan negara-negara untuk memenuhi kebutuhan energi selama musim dingin 2022-2023 (IEA, 2022).

Jerman telah mengalami perubahan besar: pasokan dari Rusia, yang dulunya merupakan pemasok utama Jerman, terhenti dimana Jerman harus mengambil tindakan darurat yang sangat mahal untuk mencari pemasok alternatif di pasar global. Perang tersebut mendorong Berlin mengambil

berbagai langkah untuk mendiversifikasi pasokannya, terutama memperluas infrastruktur impor LNG pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah krisis ini, Jerman yang sejak lama berkomitmen pada transisi energi menuju sumber-sumber terbarukan (*Energiewende*) dan telah menutup beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara dan nuklirnya, juga dengan terpaksa mengambil langkah kontroversial. Pada tahun 2022, pemerintah Jerman mengumumkan rencana untuk mengaktifkan kembali beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya ditutup atau dalam proses penutupan. Keputusan ini menimbulkan perdebatan, mengingat batu bara adalah salah satu sumber energi yang paling berdampak pada iklim. Akan tetapi pemerintah Jerman menjelaskan bahwasanya langkah ini diambil hanya diperlukan untuk menjamin keamanan energi jangka pendek dan mengurangi ketergantungan pada gas Rusia. Dan di tahun 2022 konsumsi energi primer Jerman mencapai 11.829 PJ, turun 4,7% dari tahun 2021. Pada periode yang sama, tidak hanya konsumsi gas alam (-14.8%) yang turun signifikan, namun juga konsumsi energi nuklir (-49.8%). Pemanfaatan sumber energi lain meningkat, termasuk lignit (+5.1%), batubara keras (+4.8%), minyak (+3%) dan energi terbarukan (+4.4%). Meskipun demikian, bauran energi Jerman belum mengalami perubahan yang signifikan. Minyak, gas, dan energi terbarukan tetap menjadi sumber energi yang paling banyak digunakan, diikuti oleh lignit, batubara keras, dan energi nuklir (Bundesregierung, 2022). Mereka sekali lagi menekankan bahwa ini merupakan langkah sementara dari Jerman. Situasi ini menggambarkan kompleksitas dan ketegangan antara keamanan energi, geopolitik, dan kebijakan iklim di era kontemporer. Maka dari itu penelitian ini mencoba untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Jerman dalam menangani krisis energi yang disebabkan oleh invasi Rusia, serta implikasi geopolitik dan ekonomi yang ditimbulkan dengan mengangkat rumusan masalah yaitu : Bagaimana diplomasi energi Jerman dalam menghadapi krisis energi yang terjadi akibat sanksi embargo Rusia?.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sanksi Embargo Rusia

Uni Eropa (UE) secara bertahap menjatuhkan sanksi terhadap Rusia pada tahun 2014, dimana sanksi ini diberikan sebagai tanggapan atas pelanggaran Rusia terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dengan menganeksasi wilayah Krimea secara ilegal dan mengganggu wilayah timur Ukraina. Sanksi Uni Eropa bertujuan untuk menghentikan tindakan Rusia dan mengembalikan kedaulatan Ukraina. Namun, pada 19 Maret 2015, Uni Eropa menyetujui penundaan waktu penerapan sanksi dengan pelaksanaan Perjanjian Minsk secara penuh, yang berkontribusi pada penyelesaian konflik di Ukraina. Jika perjanjian belum diimplementasikan, Uni Eropa akan melanjutkan pemberlakuan sanksi terhadap Rusia. Sejak Uni Eropa pertama kali menerapkan sanksi akibat pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina oleh Rusia pada awal Maret 2014, hingga akhir 2016, Uni Eropa telah secara berkala memperpanjang atau memperbaharui tindakan-tindakan pembatasan (sanksi) tersebut terhadap Rusia.

Pada Juli 2014 UE menerapkan sanksi ekonomi yang ditandai dengan diadopsinya keputusan dewan 2014/2015 yang mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2014. Keputusan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi ekonomi sebagai tanggapan atas destabilisasi yang dilakukan Rusia di wilayah Donbas. Dalam Keputusan Dewan 2014/512/CFSP, Uni Eropa juga meminta Rusia untuk menghentikan aliran militan, senjata, dan peralatan melintasi perbatasan untuk mencapai hasil deeskalasi yang cepat dan nyata. UE juga meminta Rusia untuk menarik lebih banyak pasukan militernya dari perbatasan. Kemudian pada akhirnya Uni Eropa mengeluarkan paket sanksi kesembilan untuk Rusia, yang bertujuan untuk melemahkan basis ekonomi Rusia, merampas teknologi dan pasar penting, dan secara signifikan mengurangi kemampuan perang negara tersebut. Di antaranya adalah sanksi ekonomi yang menghambat akses ke pasar modal Uni Eropa, sanksi transportasi yang melarang impor minyak dan batu bara dari Rusia, sanksi pertahanan yang melarang ekspor produk militer Rusia, dan sanksi blacklisting, yang berarti pembekuan aset dan larangan bepergian bagi pejabat dan entitas Rusia yang terkait.

UE telah memutuskan untuk membekukan aset-aset individu dan entitas terkait Rusia. Ini termasuk bank-bank dan perusahaan-perusahaan besar Rusia yang memiliki hubungan dengan UE. Pembekuan aset ini bertujuan untuk menghambat kemampuan Rusia untuk melakukan transaksi keuangan internasional dan mengurangi pendapatan mereka dari sumber-sumber di UE. Sanksi individual juga mencakup pembatasan perjalanan bagi individu dan entitas terkait Rusia. Ini berarti bahwa mereka tidak dapat bepergian ke negaranegara anggota UE tanpa izin khusus. UE juga telah menargetkan oligarkh-oligarkh Rusia yang terkait dengan Kremlin. Sanksi ini meliputi penyitaan kapal-kapal mewah milik oligarkh dan pembatasan kegiatan bisnis mereka. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk mengurangi kemampuan oligarkh untuk mendukung kebijakan Kremlin dan membatasi pengaruh mereka di bidang ekonomi.

Krisis Energi Di Jerman Tahun 2022 Akibat Sanksi Embargo Rusia

Energi menjadi komponen dan kebutuhan primer bagi seluruh negara. Hal tersebut karena energi dapat menyokong peningkatan laju ekonomi suatu negara, dan menjadi penggerak bagi kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga. Bagi Uni Eropa sendiri energi merupakan salah satu sektor utama, sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan energinya, Uni Eropa menjalin kerja sama dengan Rusia dan menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar Rusia. Uni Eropa telah berkontribusi sebesar 48% dari total perdagangan asing Rusia, dan sebesar 75% investasi asing asal Rusia masuk Uni Eropa. Rusia menjadi salah satu importir utama dalam bidang gas alam dan minyak bumi di negara anggota Uni Eropa. Karena harga energi Rusia yang lebih terjangkau menjadikan Uni Eropa bergantung terhadap pasokan energi Rusia. Mulanya keamanan energi Eropa berada dalam keadaan yang baik. Hal ini didukung dengan volume pipa gas yang lebih besar melalui Nord Stream yang memasuki Jerman di Greifswald, yang membuat Rusia menjadi penyumbang terbesar, keadaan energi Eropa mulai berkembang dengan baik. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, cadangan gas alam

Eropa semakin memburuk. Negara-negara Barat memberlakukan sanksi terhadap Rusia sebagai akibat dari invasi tersebut.

Selama bertahun-tahun, Jerman telah sangat bergantung pada impor energi Rusia, terutama gas alam, yang menyumbang sekitar 55% dari total impor gas negara tersebut sebelum krisis. Krisis energi yang melanda Jerman pada tahun 2022 merupakan hasil dari serangkaian faktor yang saling berkaitan, dengan invasi Rusia ke Ukraina sebagai katalis utamanya. Ketergantungan ini menjadi masalah serius ketika Rusia mulai membatasi pasokan gas ke Eropa sebagai respons terhadap sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat. Situasi ini diperparah oleh keputusan Jerman untuk meninggalkan energi nuklir dan batu bara sebagai bagian dari transisi energi hijau mereka, yang dikenal sebagai "Energiewende". Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, hal tersebut juga mengurangi fleksibilitas pasokan energi Jerman, membuatnya lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Pasar listrik di Uni Eropa juga turut terganggu karena pasokan gas alam yang terus berkurang. Krisis ini mengakibatkan lonjakan tajam harga energi di Jerman, yang berdampak signifikan pada industri dan rumah tangga. Di Jerman, harga rata-rata gas untuk rumah tangga meningkat lebih dari tiga kali lipat dari 6,11 sen per kWh pada kuartal pertama 2021 menjadi rata-rata 20,04 sen per kWh pada kuartal keempat 2022, meskipun pemerintah telah menghapuskan pajak pertambahan nilai sebesar 7%. Maka dari itu, pemerintah Jerman terpaksa langkah-langkah darurat, termasuk mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya ditutup, meningkatkan impor gas alam cair (LNG), dan menerapkan kebijakan penghematan energi yang ketat.

Krisis energi yang menimpa Jerman pada tahun 2022, memiliki dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan perekonomian Jerman. Kenaikan harga energi yang drastis akibat pengurangan pasokan gas dari Rusia menyebabkan inflasi yang tinggi. Jerman mengeluarkan hingga 440 miliar euro untuk menyelamatkan kebutuhan energi, tetapi biaya ini diprediksi tidak cukup untuk mengatasi krisis yang berkepanjangan. Kenaikan biaya energi ini berdampak langsung pada biaya produksi dan harga barang, mengurangi daya saing industri Jerman. Industri manufaktur Jerman, yang merupakan tulang punggung ekonomi, mengalami tekanan berat akibat tingginya biaya energi. Sehingga beberapa perusahaan terpaksa mengurangi produksi atau bahkan menutup pabrik sementara. Harga energi yang melambung cepat naik 35% dibanding dengan tingkat sebelum invasi, menyebabkan Pertumbuhan PDB Jerman melambat secara signifikan, dengan perkiraan pertumbuhan hanya 1,8% pada 2022, turun dari 2,6% pada 2021. Selain itu, tingkat inflasi di Jerman pun turut melonjak tinggi pada Oktober 2022 yaitu sebesar 10,4%, yang mana level tertinggi dalam 70 tahun terakhir. Kenaikan harga energi menjadi faktor utama pendorong inflasi.

Upaya Diplomasi Jerman Dalam Menangani Krisis Energi Akibat Sanksi Embargo Rusia Tahun 2022

1. Meningkatkan Impor Liquefied Natural Gas (LNG) dari AS, Qatar, dan Norwegia

Terjadinya perang di Ukraina menjadi salah satu faktor Jerman mendiversifikasi pasokan gas yang dikirim dari Rusia ke puncak agenda pemerintah. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah terus membantu pembangunan infrastruktur impor gas alam cair (LNG) di negara itu sendiri. Pemerintah berencana membangun terminal impor permanen di daratan dan menyewa terminal terapung jangka pendek. Terminal pertama akan dibuka pada Desember 2022. Gas alam cair, atau LNG, adalah gas alam yang telah didinginkan (-162°C) hingga menjadi cair sehingga lebih mudah disimpan dan diangkut. Memiliki volume 600 kali lebih sedikit dalam bentuk cair daripada gas, LNG dapat diangkut dengan kapal, truk, atau kereta api ke tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan pipa gas alam konvensional, atau bahkan dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar. Secara umum, gas ini dicairkan pertama di negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang menjadi pendorong utama pertumbuhan LNG.

Dalam beberapa bulan pertama sejak terminal impor LNG Jerman beroperasi, sebagian besar dari sekitar 20 kargo berasal dari AS. Pada tanggal 3 Januari 2023, kapal tanker Maria Energy tiba di pelabuhan Laut Utara Wilhelmshaven membawa kiriman pertama gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat. LNG tersebut kemudian akan diolah kembali menjadi gas di terminal terapung khusus yang telah diresmikan bulan sebelumnya oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Fasilitas Wilhelmshaven merupakan salah satu dari beberapa terminal yang dibangun untuk menjaga keamanan pasokan energi. Setelah pengiriman pertama, impor LNG dari AS terus meningkat. Pada bulan Juli 2023, Amerika Serikat mengirimkan 1,5 juta ton LNG ke Uni Eropa, dengan sebagian besar tersebut menuju Jerman. Rusia juga mulai menyusul dengan mengirimkan 1,3 juta ton LNG ke UE pada periode yang sama, tetapi perubahan tersebut lebih dikaitkan dengan penurunan pengiriman dari AS daripada peningkatan impor dari Rusia. Dan Jerman mengakhiri tahun 2023 dengan menyumbang 4% atau 0,6 billion cubic feet per day dari total impor Eropa. AS telah memasok impor LNG Jerman lebih dari 80% (VOA. 2023).

Selain Amerika Serikat, Qatar juga turut andil dalam membantu negara Eropa terutama Jerman dalam memenuhi kebutuhannya. Pada tanggal 29 November 2022, Qatar Energy dan ConocoPhillips menandatangani perjanjian untuk mengirimkan 2 juta ton LNG per tahun dari Qatar ke Jerman mulai tahun 2026. Qatar sedang dalam pembicaraan dengan perusahaan-perusahaan Jerman seperti RWE dan Uniper SE untuk kontrak LNG jangka panjang. Ini menunjukkan komitmen Qatar untuk menyediakan pasokan energi yang andal ke semua pasar utama di seluruh dunia. Gas tersebut akan berasal dari usaha patungan ConocoPhillips di Qatar dan dikirim ke terminal impor terapung Brunsbuttel yang sedang dibangun. Terminal ini merupakan salah satu dari beberapa fasilitas impor yang dibangun untuk membantu mencegah kekurangan pasokan energi di Jerman.

Selain bergantung pada Rusia, Jerman juga bergantung pada impor gas pipa dari Norwegia dan LNG melalui Belgia dan Belanda. Pada saat yang sama, konsumsi gas turun drastis. Pada Oktober 2022, impor gas sebesar 33%

berasal dari Norwegia, 28% dari Belanda, dan 25% dari Belgia. Norwegia adalah mitra Jerman yang penting sebagai pemasok energi terbesar dalam transisi energi. Selain itu, Norwegia telah membantu masalah internasional, seperti mendukung Ukraina sesuai dengan tindakan UE. Kerjasama antara kedua negara ini diharapkan untuk menjaga wilayah, perdagangan bebas, dan etika global. Pada tahun 2022, impor melalui infrastruktur pipa Norwegia melampaui 1.170 TWh, yang menempati peringkat kedua setelah impor LNG sebesar 1.500 TWh. Volume yang dikirim melalui pipa Norwegia empat kali lebih besar daripada volume yang dikirim melalui pipa Nord Stream, yang mengirimkan sekitar 300 TWh. Selain itu, menurut Chamber of Commerce Jerman-Norwegia, aktivitas ekspor bahan bakar fosil dan gas Norwegia ke Jerman akan mencapai NOK 620 miliar pada tahun 2022, setara dengan EUR 58 miliar (Prof Dr Guntramwolf, Alexandra Gritz, 2023). Selama Sembilan bulan pertama tahun 2023, Norwegia telah memperluas eksportnya ke Jerman dengan menyumbang 48 persen dari impor gas selama sembilan bulan pertama tahun 2023, naik dari kurang dari 20 persen kurang dari dua tahun lalu.

2. Kemitraan Energi Antara Jerman dan Kanada Untuk Pengembangan Hidrogen Hijau

Kemitraan energi antara Jerman dan Kanada untuk pengembangan hidrogen hijau telah menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan energi global, terutama setelah krisis energi yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Pada bulan Agustus 2022, Jerman dan Kanada menandatangani perjanjian kerja sama untuk produksi dan transportasi hidrogen. Kesepakatan ini bertujuan untuk menciptakan rantai pasokan transatlantik untuk hidrogen, dengan target pengiriman pertama pada tahun 2025. Pemerintah Jerman menyatakan akan mengalokasikan dana publik hingga US\$3,84 miliar atau setara dengan 60 triliun rupiah (kurs 15.744 rupiah) dana publik untuk pembelian hidrogen hijau dan turunannya. Dana publik akan digunakan untuk mengkompensasi selisih harga beli dan harga jual antara tahun 2027 dan 2036. Perjanjian ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja kelas menengah di kedua negara dan mendukung pertumbuhan lokal. PM Kanada Justin Trudeau menyebutnya sebagai langkah maju bersejarah untuk masa depan bersama.

Pemerintah Jerman telah menyepakati persiapan untuk mensubsidi pembangkit listrik berbahan bakar gas yang dapat bergeser ke hidrogen. Hidrogen hijau diproduksi melalui proses elektrolisis menggunakan energi terbarukan, sehingga tidak menghasilkan emisi karbon dioksida (CO₂). Kanada memiliki potensi besar dalam memproduksi hidrogen hijau karena sumber daya alamnya yang melimpah dan infrastruktur energi yang berkembang. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah mengembangkan rantai pasokan hidrogen hijau transatlantik, mempercepat produksi hidrogen terbarukan di kedua negara, serta mendukung transisi energi global dan mencapai target iklim. Kemitraan ini membawa manfaat signifikan bagi kedua negara. Bagi Jerman, ini berarti diversifikasi sumber energi dan pengurangan ketergantungan pada impor gas alam, sekaligus mendukung transisi energi (Energiewende) dan target pengurangan emisi. Sementara bagi Kanada, kemitraan ini membuka peluang ekonomi baru dalam sektor energi

terbarukan dan memposisikan negara tersebut sebagai eksportir utama energi bersih global.

3. Negosiasi dengan Norwegia untuk Meningkatkan Pasokan Gas Melalui Pipa Dari Norwegia dan Belanda

Pada tahun 2022, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina memuncak, menyebabkan krisis energi yang signifikan di Eropa, terutama bagi Jerman yang sangat bergantung pada gas alam Rusia. Dalam upaya untuk menjaga ketersediaan gas alam dan mengurangi ketergantungan pada Rusia, Jerman melakukan langkah diplomasi energi yang intensif terhadap Norwegia, salah satu produsen gas alam terbesar di Eropa. Diplomasi energi Jerman terhadap Norwegia mencakup serangkaian pertemuan tingkat tinggi dan negosiasi bilateral. Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Oslo pada Agustus 2022. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas peningkatan ekspor gas alam Norwegia ke Jerman dan kemungkinan kerjasama jangka panjang dalam bidang energi terbarukan, terutama hidrogen hijau. Sebagai hasil dari upaya diplomasi ini, Norwegia berkomitmen untuk mempertahankan tingkat produksi gas yang tinggi dan mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan pasokan gas ke Jerman dan Eropa secara umum. Perusahaan energi milik negara Norwegia, Equinor, juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan produksi gas dan memprioritaskan ekspor ke Eropa.

Selain itu, kedua negara juga membahas kerjasama dalam pengembangan infrastruktur energi, termasuk kemungkinan pembangunan pipa gas baru dan terminal LNG (Liquefied Natural Gas) di Jerman. Diskusi juga mencakup investasi bersama dalam teknologi energi bersih, seperti penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) serta produksi hidrogen hijau, sebagai bagian dari strategi transisi energi jangka panjang kedua negara. Upaya diplomasi energi ini tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek untuk krisis gas, tetapi juga bertujuan untuk membangun kemitraan energi yang lebih berkelanjutan dan tahan terhadap guncangan geopolitik di masa depan.

4. Analisis Konsep Diplomasi Energi terhadap Upaya Diplomasi Energi Jerman Dalam Menangani Krisis Energi

Seiring berjalannya era globalisasi, diplomasi energi menjadi salah satu konsep terkemuka dalam studi hubungan internasional yang membahas mengenai bagaimana negara-negara menggunakan sumber daya energi mereka sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi di mata internasional. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, diplomasi energi pertama kali muncul. Saat itu, negara-negara mulai menyadari bahwa energi adalah aset vital untuk keamanan nasional dan kemakmuran ekonomi. Dalam diplomasi, kekuatan seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Eropa Barat mulai menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi hubungan internasional. Diplomasi energi diperkuat oleh krisis energi global 1970-an.

Andreas Goldthau adalah Profesor di Royal Holloway, Universitas London dan peneliti terkemuka dalam politik energi global. Goldthau mendefinisikan diplomasi energi sebagai penggunaan alat kebijakan luar negeri untuk mengamankan akses terhadap sumber daya energi asing dan mempromosikan kerja sama energi internasional. Ia meyakini bahwa

diplomasi energi merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri suatu negara. Goldthau menekankan pentingnya memahami diplomasi energi dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Ia percaya bahwa dinamika kekuatan global, aliansi strategis dan persaingan antar negara sangat mempengaruhi bagaimana diplomasi energi dipraktikkan. Dalam analisisnya, Goldthau mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat dalam diplomasi energi, termasuk negara, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional. Ia menekankan, setiap pemain memiliki kepentingan dan agenda masing-masing yang dapat mempengaruhi hasil diplomasi energi. Goldthau juga berpendapat bahwa negara-negara menggunakan diplomasi energi untuk meningkatkan keamanan energi mereka, baik dari sisi pasokan (untuk negara importir) maupun permintaan (untuk negara eksportir).

Berdasarkan teori liberalism interdependensi, menekankan bahwa dalam hubungan internasional kerjasama antar negara merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai keamanan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, Jerman menggunakan diplomasi energi sebagai alat guna mencapai tujuan politik dan ekonominya. Dalam fenomena krisis energi Jerman, Jerman menggunakan beberapa upaya diplomasi energi untuk meningkatkan keamanan energinya dari sisi importir. Untuk memastikan keamanan energinya, tentunya Jerman mencari alternative pasokan energi pasca sanksi embargo Rusia. Sebagai alternatifnya, Jerman mengimpor Liquefied Natural Gas (LNG) dari AS, Qatar, dan Norwegia. Jerman berusaha mengurangi ketergantungan pada gas alam dari Rusia, yang telah menjadi sumber utama energi. Mengimpor LNG dari AS memungkinkan Jerman untuk mendapatkan pasokan yang lebih beragam dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu negara. selain itu AS memiliki kapasitas produksi LNG yang besar dan telah menjadi salah satu eksportir LNG terbesar di dunia. Hal ini memberikan Jerman akses ke pasokan yang stabil dan dapat diandalkan. Selain dari AS, Jerman telah menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Qatar untuk mengimpor LNG, yang menunjukkan komitmen Qatar untuk menyediakan pasokan energi yang stabil. Perjanjian ini mencakup pengiriman 2 juta ton LNG per tahun mulai tahun 2026, yang penting untuk memastikan keamanan pasokan energi Jerman di masa depan. Qatar dikenal sebagai salah satu produsen gas alam terbesar dan terkemuka di dunia, sehingga dianggap sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan energi Jerman.

Jerman juga telah bermitra dengan negara tetangganya yaitu Norwegia. Norwegia adalah salah satu negara tetangga Jerman dan memiliki infrastruktur yang sudah ada untuk mengalirkan gas ke Jerman melalui pipa. Ini membuat Norwegia menjadi pilihan yang logis untuk memenuhi kebutuhan gas Jerman dengan cepat dan efisien. Norwegia memiliki reputasi sebagai pemasok gas yang stabil dan dapat diandalkan. Pada tahun 2022, Norwegia menyuplai sekitar 33% dari total impor gas Jerman, menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga keamanan energi Jerman. Secara keseluruhan, pemilihan untuk mengimpor LNG dari AS, Qatar, dan Norwegia mencerminkan upaya Jerman untuk meningkatkan keamanan energi, mengurangi ketergantungan pada Rusia, dan memastikan pasokan energi

yang berkelanjutan dan dapat diandalkan di tengah tantangan geopolitik yang ada. Dengan demikian, konsep diplomasi energi menurut Goldthau memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis bagaimana Jerman merespons krisis energi melalui strategi diversifikasi pasokan dan kerjasama internasional, serta bagaimana faktor-faktor geopolitik mempengaruhi kebijakan energi negara tersebut.

KESIMPULAN

Krisis energi akibat perang di Ukraina mendorong Jerman untuk mengurangi ketergantungan energi dari Rusia. Dalam teori liberalisme interdependensi menekankan bahwa dalam hubungan internasional, kerjasama antar negara merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai keamanan dan kesejahteraan. Dalam hal ini Jerman menggunakan diplomasi energi untuk mencapai kebutuhan energinya. Tidak hanya itu, diplomasi energi yang dilakukan oleh Jerman juga sebagai salah satu upaya untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara mitra. Upaya diplomasi energi tersebut dilakukan dengan membangun terminal impor gas alam cair (LNG) dan menandatangani perjanjian impor dengan Qatar, Norwegia, dan Amerika Serikat. Jerman juga menjalankan diplomasi energi sebagai upaya diversifikasi dan keamanan pasokan energi melalui kerjasama internasional yang mencerminkan pentingnya energi dalam stabilitas ekonomi dan politik global. Krisis energi Jerman pasca invasi Rusia ke Ukraina memaksa negara tersebut melakukan transformasi cepat dalam strategi pasokan gas.

Strategi diversifikasi ini bertujuan tidak hanya mengatasi krisis jangka pendek, tetapi juga merancang ketahanan energi jangka panjang dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keberhasilan strategi ini tercermin dari berhasilnya Jerman menurunkan impor gas Rusia dari 55% menjadi kurang dari 10% dalam waktu relatif singkat, serta komitmen kuat untuk mencapai target energi terbarukan sebesar 80% pada 2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Agency, I. E. (2022). Gas Market Report, Q4 2022. IEA, Paris. Retrieved from IEA: <https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q4-2022>
- Bundesregierung. (2022). Energie: Kohle wird vorübergehend stärker genutzt. Retrieved from Bundesregierung.: <https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/energiewende/energie-kohle-2054912>
- Diva Lufiana Putri. (2022). Sejarah Konflik Rusia Vs Ukraina. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/25/060500265/sejarahkonflik-rusia-vs-ukraina?page=all#page2>

- Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, Germany. (2022). "Joint declaration on energy cooperation between Germany and Norway."
- Gritz. A. et.al. (2023). Gas and Energy Security in Germany and Central and Eastern Europe. Retrieved from German Council on Foreign Relations: <https://dgap.org/en/research/publications/gas-and-energy-securitygermany-and-central-and-eastern-europe-0>
- Gritz. A. et.al. (2023). Gas and Energy Security in Germany and Central and Eastern Europe. Retrieved from German Council on Foreign Relations: <https://dgap.org/en/research/publications/gas-and-energy-securitygermany-and-central-and-eastern-europe-0>
- Humpert. M. (2023). Norway Supplied Almost Half of German Natural Gas Imports During First Nine Months of 2023. Retrieved from High North News: <https://www.highnorthnews.com/en/norway-supplied-almost-halfgerman-natural-gas-imports-during-first-nine-months-2023>
- IFO Institute. (2022). Business Climate Index, November 2022. Retrieved from IFO Institute: <https://www.ifo.de/en/facts/2022-11-24/ifo-business-climateindex-rises-november-2022>
- VOA. (2023). Tanker Pertama yang Bawa LNG dari AS Tiba di Jerman. Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/tanker-pertamayang-bawa-lng-dari-as-tiba-di-jerman/6902131.htm>
- Walfe, T. A. (1978). Introduction to International Relation. Englewood Cliff: Prentice-Hall.